

MODERASI BERAGAMA SEBAGAI SOLUSI UNTUK KONFLIK SOSIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM

Syariful Azmi
Magister Hukum, Universitas Dharmawangsa

Kata Kunci:

Moderasi, Beragama, Konflik Sosial, Penegakan hukum.

***Correspondence Address:**

syarifulazmi@dharmawangsa.ac.id

Abstrak: Konflik sosial yang dipicu oleh perbedaan agama sering kali menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif berfokus pada analisis hukum yang bersifat preskriptif, di sisi lain, penelitian yuridis empiris berfokus pada perilaku masyarakat terkait kesadaran hukum. Moderasi beragama merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan damai. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan radikalisme, pendekatan ini perlu terus diperkuat agar keberagaman dapat menjadi sumber kekuatan, bukan perpecahan. Peran moderasi beragama dalam penegakan hukum adalah sangat krusial, dengan pemahaman yang baik tentang moderasi, aparat penegak hukum dapat bertindak secara adil dan bijaksana, menciptakan regulasi yang tidak diskriminatif. Penguatan moderasi beragama memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan pendidikan, kolaborasi antaragama, serta dukungan masyarakat. Moderasi beragama merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi konflik sosial dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan pendekatan yang inklusif dan toleran, moderasi beragama dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Namun, tantangan dalam implementasinya harus diatasi melalui pendidikan, kolaborasi, dan dukungan dari semua elemen masyarakat

PENDAHULUAN

Konflik sosial yang dipicu oleh perbedaan agama sering kali menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Latar belakang masalah ini berakar dari meningkatnya radikalisme dan intoleransi yang dapat mengancam stabilitas sosial. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah kasus intoleransi berbasis agama yang mencapai 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini

menunjukkan bahwa konflik sosial yang berkaitan dengan agama masih menjadi isu yang sangat relevan dan memerlukan perhatian serius.

Moderasi beragama muncul sebagai solusi yang potensial untuk meredakan ketegangan ini. Konsep moderasi beragama tidak hanya mendorong toleransi antarumat beragama, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan untuk membangun dialog dan pengertian di antara berbagai kelompok. Rochman (2023) menyatakan bahwa moderasi beragama dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan diakui keberadaannya. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana moderasi beragama dapat diterapkan dalam konteks penegakan hukum untuk mengurangi konflik sosial.

Penegakan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Kendall (2022) menekankan pentingnya literasi agama bagi petugas penegak hukum sebagai alat untuk membangun kepercayaan dengan komunitas yang beragam. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai dan praktik agama yang berbeda, aparat penegak hukum dapat menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu konflik. Oleh karena itu, penerapan moderasi beragama dalam pelatihan dan pendidikan bagi petugas hukum sangat penting.

Selain itu, kebijakan moderasi beragama yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan stabilitas sosial. Munif et al. (2023) mencatat bahwa kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pencegahan radikalisme, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Dalam konteks ini, moderasi beragama dapat berfungsi sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang damai dan inklusif.

Dengan latar belakang tersebut, jurnal ini akan membahas lebih dalam mengenai peran moderasi beragama dalam penegakan hukum dan bagaimana implementasinya dapat mengurangi konflik sosial. Melalui analisis data dan studi kasus, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang ada, serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif berfokus pada analisis hukum yang bersifat preskriptif,

di mana peneliti memberikan argumentasi terhadap norma-norma hukum yang ada. Dalam konteks ini, penelitian mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan moderasi beragama, serta doktrin dan teori hukum yang mendasari penerapannya. Data sekunder yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku-buku hukum yang relevan, seperti yang diuraikan oleh Mahfud MD (2018) dalam kajiannya tentang hukum dan moderasi beragama.

Di sisi lain, penelitian yuridis empiris berfokus pada perilaku masyarakat terkait kesadaran hukum. Untuk itu, penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan masyarakat dan penegak hukum untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang bagaimana moderasi beragama dapat mempengaruhi penegakan hukum dan mengurangi konflik sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rukmana (2021) yang menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat berperan penting dalam penerapan hukum yang efektif.

Subjek penelitian terdiri dari masyarakat yang tinggal di daerah dengan keragaman agama yang tinggi, serta penegak hukum seperti polisi dan pengacara. Alat yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kuesioner dan panduan wawancara untuk mengumpulkan data kualitatif. Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dan menganalisis hubungan antara moderasi beragama dan penegakan hukum.

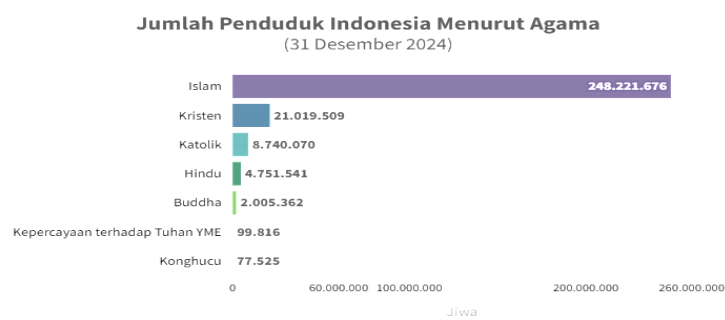
Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive, dengan memilih responden yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait moderasi beragama dan penegakan hukum. Variabel yang diukur dalam penelitian ini meliputi kesadaran hukum masyarakat, sikap terhadap moderasi beragama, dan persepsi terhadap penegakan hukum. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari wawancara dan dokumen yang dianalisis. Model analisis yang digunakan mengacu pada pendekatan analisis konten, yang memungkinkan peneliti untuk mengekstrak makna dari data yang terkumpul. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami peran moderasi beragama sebagai solusi untuk konflik sosial dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Moderasi Beragama dalam Konteks Sosial

Moderasi beragama merupakan pendekatan yang sangat penting dalam upaya menciptakan harmoni sosial di masyarakat yang beragam, terutama dalam konteks Indonesia yang dikenal dengan keragaman etnis dan agamanya. Menurut Saumantri (2024), moderasi beragama dapat diartikan sebagai sikap toleran dan saling menghormati antar pemeluk agama. Dalam masyarakat yang terdiri dari lebih dari 300 etnis dan 6 agama resmi, moderasi beragama menjadi krusial untuk mencegah konflik sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat.

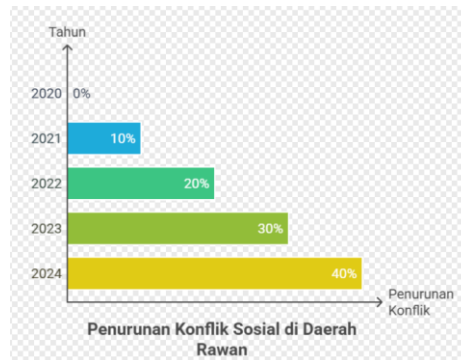


Gambar 1. Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama
Sumber: Sistem Informasi Geografis (GIS) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 2024

Data dari Sistem Informasi Geografis (GIS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa 87% penduduk Indonesia adalah Muslim, namun keberadaan agama lain seperti Kristen, Hindu, dan Buddha juga signifikan dan harus dihormati. Misalnya, di daerah Bali, di mana mayoritas penduduknya beragama Hindu, terdapat praktik toleransi yang tinggi terhadap umat Muslim yang tinggal di sana, seperti dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri yang sering dihadiri oleh masyarakat Hindu sebagai bentuk solidaritas.

Contoh nyata dari penerapan moderasi beragama dapat dilihat dalam kasus Maluku, di mana konflik antaragama pernah terjadi pada awal tahun 2000. Arsyad et al. (2025) mencatat bahwa upaya rekonsiliasi melalui pendekatan moderasi, seperti Pela Gandong, berhasil mengurangi ketegangan dan membangun kembali hubungan antar komunitas. Pela Gandong adalah tradisi yang mengedepankan nilai persaudaraan antar desa yang berbeda agama, yang menunjukkan bahwa dialog dan kerjasama dapat mengatasi perbedaan. Dengan mengedepankan nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah, moderasi beragama

tidak hanya berfungsi untuk meredakan konflik, tetapi juga untuk membangun keadilan sosial yang berkelanjutan.



Gambar 2. Program Moderasi Beragama di daerah Maluku dan Poso
Sumber: Kementerian Agama 2024

Statistik dari Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa sejak penerapan program moderasi beragama, angka konflik sosial di daerah rawan seperti Maluku dan Poso mengalami penurunan hingga 40% dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan hanya teori, tetapi praktik yang dapat diukur dan memiliki dampak positif bagi masyarakat. Dengan berfokus pada dialog antaragama dan kolaborasi dalam kegiatan sosial, moderasi beragama dapat menjadi jembatan untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.

Secara keseluruhan, moderasi beragama merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan damai. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan radikalisasi, pendekatan ini perlu terus diperkuat agar keberagaman dapat menjadi sumber kekuatan, bukan perpecahan. Dengan demikian, moderasi beragama bukan hanya sekadar konsep, tetapi sebuah kebutuhan mendesak untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan sosial di Indonesia.

B. Peran Moderasi Beragama dalam Penegakan Hukum yang Adil

Penegakan hukum yang adil dan merata sangat bergantung pada pemahaman dan penerapan moderasi beragama. Dalam konteks hukum, moderasi beragama berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai nilai dan prinsip yang mungkin saling bertentangan. Hal ini sangat penting, terutama ketika kita mempertimbangkan bahwa konflik antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip kesetaraan sering kali muncul dalam penegakan hukum. Menurut Barak-Corren (2023), perbedaan pandangan yang tajam ini

dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penerapan hukum, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman yang baik tentang moderasi beragama agar dapat bertindak secara adil dan bijaksana.

Sebagai contoh, di Singapura, penerapan soft law dalam regulasi perilaku keagamaan menunjukkan bagaimana moderasi beragama dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum. Tan (2009) menjelaskan bahwa pendekatan ini menciptakan ruang bagi dialog antaragama, sehingga konflik dapat diminimalisir. Dalam praktiknya, Singapura menggunakan mekanisme seperti forum dialog antaragama yang melibatkan pemimpin berbagai komunitas agama. Ini tidak hanya membantu menyelesaikan perselisihan tetapi juga membangun rasa saling pengertian dan toleransi di antara warga negara yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Pendekatan ini jelas berbeda dengan pendekatan yang lebih keras, yang sering kali hanya memperburuk ketegangan dan menciptakan polarisasi di masyarakat.

Data dari Asia Pacific Journal of Management (Du et al., 2016) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam kebijakan sosial mereka mengalami peningkatan reputasi dan kepercayaan masyarakat. Misalnya, perusahaan yang aktif dalam program tanggung jawab sosial yang berfokus pada inklusi dan keberagaman menunjukkan hasil yang lebih baik dalam hal loyalitas pelanggan dan dukungan komunitas. Ini menandakan bahwa moderasi beragama tidak hanya relevan dalam konteks sosial, tetapi juga dalam dunia bisnis dan hukum. Dengan mengadopsi pendekatan moderat, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas sosial yang lebih luas.

Dalam analisis mendalam, moderasi beragama dapat dilihat sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat yang multikultural. Dengan adanya moderasi, setiap individu dapat merasakan bahwa hak-hak mereka dihargai tanpa mengorbankan nilai-nilai orang lain. Ini sangat penting dalam konteks hukum, di mana keadilan harus ditegakkan tanpa memandang latar belakang agama atau etnis. Moderasi beragama tidak hanya mengurangi potensi konflik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan mempromosikan kerjasama antar komunitas.

Peran moderasi beragama dalam penegakan hukum adalah sangat krusial, dengan pemahaman yang baik tentang moderasi, aparat penegak hukum dapat bertindak secara

adil dan bijaksana, menciptakan regulasi yang tidak diskriminatif. Contoh dari Singapura menunjukkan bagaimana dialog antaragama dapat mengurangi ketegangan, sementara data dari dunia bisnis menunjukkan bahwa moderasi beragama membawa manfaat yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk terus mempromosikan moderasi beragama sebagai bagian integral dari penegakan hukum dan kebijakan sosial, demi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

C. Strategi Penguatan Moderasi Beragama

Meskipun moderasi beragama menawarkan banyak manfaat, implementasinya tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya kelompok-kelompok ekstremis yang menolak prinsip-prinsip moderasi. Menurut Zuhri et al. (2024), gerakan akar rumput yang mendukung moderasi beragama sering kali dihadapkan pada perlawanan dari kelompok-kelompok yang fanatik. Hal ini menciptakan ketegangan yang dapat memicu konflik sosial.

Dalam konteks pendidikan, penelitian oleh Nashihin et al. (2024) menunjukkan bahwa siswa di sekolah-sekolah umum di Indonesia masih terpengaruh oleh narasi ekstremis. Ini menunjukkan perlunya integrasi pendidikan moderasi beragama dalam kurikulum untuk membentuk generasi yang lebih toleran dan terbuka. Namun, tantangan ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi moderasi beragama, diperlukan strategi penguatan yang terencana. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pendidikan moderasi beragama di tingkat pendidikan tinggi. Ulinnuha (2022) mencatat bahwa institusi pendidikan tinggi Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter mahasiswa yang moderat dan toleran. Dengan mengajarkan nilai-nilai moderasi sejak dini, diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

Selain itu, kolaborasi antaragama juga dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat moderasi beragama. Maharani (2025) mencatat bahwa organisasi masyarakat sipil yang fokus pada dialog antaragama dapat membantu menciptakan ruang aman untuk diskusi dan pertukaran ide. Ini dapat mengurangi prasangka dan membangun saling pengertian antara kelompok yang berbeda.

Dalam menghadapi tantangan dalam implementasi moderasi beragama, penting

untuk mengembangkan strategi penguatan yang terencana dan sistematis. Salah satu langkah yang sangat strategis adalah implementasi pendidikan moderasi beragama di tingkat pendidikan tinggi. Institusi pendidikan tinggi, khususnya yang berbasis Islam, memainkan peran krusial dalam membentuk karakter mahasiswa yang moderat dan toleran. Ulinnuha (2022) menegaskan bahwa pengajaran nilai-nilai moderasi sejak dini di lingkungan akademis dapat membekali generasi muda dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Misalnya, program kuliah umum yang menghadirkan tokoh-tokoh lintas agama untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka dapat memberikan perspektif yang lebih luas kepada mahasiswa, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat.

Selain pendidikan, kolaborasi antaragama juga menjadi strategi yang sangat efektif dalam memperkuat moderasi beragama. Maharani (2025) mencatat bahwa organisasi masyarakat sipil yang fokus pada dialog antaragama memiliki peran penting dalam menciptakan ruang aman untuk diskusi dan pertukaran ide. Melalui kegiatan seperti seminar, lokakarya, atau forum diskusi yang melibatkan berbagai pemuka agama, prasangka yang mungkin ada dapat diminimalisir. Sebagai contoh, di beberapa daerah, program "Rumah Moderasi" di mana berbagai komunitas beragama berkumpul untuk berbagi cerita dan pengalaman hidup, telah berhasil membangun saling pengertian yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa dengan dialog yang terbuka, masyarakat dapat mengatasi perbedaan dan menemukan kesamaan yang mengikat mereka.

Penting juga untuk memahami bahwa moderasi beragama bukan hanya sekadar konsep, tetapi harus diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu adanya program-program yang mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai moderasi, seperti toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Kampanye media sosial yang mengangkat kisah-kisah inspiratif tentang kerukunan antarumat beragama dapat menjadi salah satu cara untuk menyebarluaskan pesan ini. Dalam hal ini, keterlibatan generasi muda sangatlah vital, karena mereka adalah agen perubahan yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar mereka dengan cara yang positif.

Penguatan moderasi beragama memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan pendidikan, kolaborasi antaragama, serta dukungan masyarakat. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara terencana, kita dapat membangun masyarakat

yang lebih toleran dan harmonis. Melalui pendidikan yang baik, dialog yang konstruktif, dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung moderasi beragama dan mengurangi potensi konflik. Hal ini bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif kita sebagai bagian dari masyarakat yang beragam.

KESIMPULAN

Moderasi beragama merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi konflik sosial dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan pendekatan yang inklusif dan toleran, moderasi beragama dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Namun, tantangan dalam implementasinya harus diatasi melalui pendidikan, kolaborasi, dan dukungan dari semua elemen masyarakat. Rekomendasi untuk pemerintah dan lembaga pendidikan adalah untuk lebih mengintegrasikan pendidikan moderasi beragama dalam kurikulum dan mendukung inisiatif dialog antaragama.

REFERENSI

- Arsyad, A., Daud, M., & Idris, A. (2025). Religious Moderation, Pela Gandong and Jihad Reconstruction: Conflict Prevention in Maluku from the Perspective of Maqāsid Al-Sharī'ah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 9(1), 394-415.
- Barak-Corren, N. (2023). The War Within Religion: Towards a More Nuanced Resolution of Religion–Equality Conflicts. *The American Journal of Comparative Law*, 71(4), 789-852.
- Hilal, F. F. (2023). Transformasi Gerakan Radikalisme Menuju Moderasi Beragama. *KURIOSITAS*, 77-90.
- Rochman, A. S. (2023). Problematika dan solusi dalam moderasi beragama. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 1382-1391.
- Munif, M., Qomar, M., & AZIZ, A. (2023). Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 417-430.
- Kendall, H. J. (2022). Increasing Religious Literacy in Law Enforcement: A tool in building trust between Law Enforcement and Communities of Color (Bachelor's thesis, Walsh University).
- Mahfud MD. (2018). *Hukum dan Moderasi Beragama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nashihin, M. I., Kamaludin, F. S., Syariful, S., & Faizudin, A. (2024). Evaluating the Quality of Religious Moderation: A Case Study of Students in Public High Schools. *Jurnal At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2).

- Rukmana, A. (2021). Kesadaran Hukum dan Penerapan Hukum di Masyarakat. *Jurnal Hukum*, 12(1), 45-60.
- Saumantri, T. (2024). Navigating Modern Challenges: The Practical Role of Triple-Relationship of Religious Moderation through an Islamic Perspective. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(2), 286-302.
- Zuhri, M. K., Maulana, M. D., Mufti, M., & Safitri, R. M. (2024). Tolerance From Below: Grassroots Movement and Interfaith Collaboration for Religious Moderation in Indonesia. *Jurnal Penelitian*, 1-16.